SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam jangka waktu tertentu;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk melaksanakan strategi penanggulangan kemiskinan, disusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tingal satu rumah.
8. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

10. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

(1) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui:
   a. strategi; dan
   b. program.
(2) Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
   a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
   b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
   c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
   d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; dan
   e. melakukan perbaikan data penduduk miskin.
(3) Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga dan individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
   b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
   c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

BAB III
PELAKSANAAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 3

(1) RPKD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi Tahunan yang disusun setiap tahun.

(3) Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
   b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
   c. matriks target keberhasilan; dan
   d. lokasi prioritas.

BAB IV
SISTEMATIKA

Pasal 4

(1) RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   BAB I PENDAHULUAN
   BAB II KONDISI UMUM DAERAH
   BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH
   BAB IV MATRIKS PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2021 – 2026
   BAB V PENUTUP
(2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan RKPD dapat bersumber dari :
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2023
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026

Pemerintah Kabupaten Kebumen

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan dengan baik. RPKD merupakan laporan yang disusun secara periodik dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kebumen, sebagai hasil sinkronisasi dan koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kebumen yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah dan non pemerintah. RKPD menggambarkan strategi, program dan lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih terdapat kekurangan, sehingga saran dan masukan sangat kami harapkan dalam rangka untuk perbaikan dokumen RPKD selanjutnya. Akhirnya kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 7
1.1 Latar Belakang 7
1.2 Maksud dan Tujuan 8
1.3 Ruang Lingkup 9
1.4 Dasar Hukum 9
1.5 Sistematika 10
BAB II KONDISI UMUM DAERAH 11
2.1 Kondisi Geografi 11
2.1.1 Geologi 12
2.1.2 Hidrologi 13
2.1.3 Klimatologi 14
2.1.4 Penggunaan Lahan 15
2.2 Potensi Pengembangan Wilayah 16
2.3 Wilayah Rawan Bencana 20
2.4 Kondisi Demografi 22
2.5 Kondisi Perekonomian 27
2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi 27
2.5.2 PDRB Per Kapita 33
2.5.3 Ketimpangan Pendapatan 34
2.5.4 Penanaman Modal 35
BAB III PROFIL KEMISKINAN 36
BAB IV STRATEGI, PROGRAM DAN LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN 41
4.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan 41

4.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 41
4.3 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan 42
Lampiran Program Matrik Program/Kegiatan/Subkegiatan 43
BAB V PENUTUP 54
DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kebumen (Ha) 16
Tabel II.2 Data Investasi *Shrimp Estate* di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 18
Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 23
Tabel II.4 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen 24
Tabel II.5 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 25
Tabel II.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2022 26
Tabel II.7 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 (%) 28
Tabel II.8 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 29
Tabel II.9 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 30
Tabel II.10 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) 31
Tabel II.11 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 32
Tabel II.12 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2021 32
Tabel II.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 33
Tabel II.14 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen) 34
Tabel II.15 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 35
Tabel III.1 Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 .. 37
Tabel III.2 Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022 38
Tabel III.3 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen..... 11
Gambar II.2 Peta Topogragi Kebumen 12
Gambar II.3 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen 14
Gambar II.4 Jumlah Curah Hujan Menurut bulan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 15
Gambar II.5 Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung – Karangbolong..... 19
Gambar II.6 Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen 21
Gambar II.7 Jumlah Curah Hujan Menurut bulan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022..... 22
Gambar II.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022..... 27
Gambar II.9 PDRB Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022. 34
Gambar III.1 Profil Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah Tahun 2022..... 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TAHUN 2021-2026.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup [1]. Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidak mampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup. Pendekatan yang dipakai dalam mengukur kemiskinan adalah pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*). Kebutuhan dasar diukur dari pengeluaran rumah tangga atas sejumlah komoditas makanan dan non makanan. Kemiskinan disebabkan dari berbagai faktor dan indikator. Didalam konteks pembangunan kemiskinan dibedakan menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif serta kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan absolut mengacu pada suatu standar yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Pengukuran Kemiskinan makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Pengukuran kemiskinan makro menyediakan data tentang jumlah penduduk miskin secara agregat (nasional) yang dihitung dari hasil estimasi atau perkiraan sampel data Susenas. Sedangkan kemiskinan mikro didasarkan 14 (empat belas) kriteria kemiskinan dengan berbasis pada rumah tangga. Ke-14 variabel yang digunakan adalah luas lantai perkapita, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum,

sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu,frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, dan aset yang dimiliki rumah tangga.

Kemiskinan di Kabupaten Kebumen juga menjadi salah satu permasalahan utama yang belum terselesaikan, walaupun berbagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan, kondisi kemiskinan masih tinggi dan tertinggal dengan beberapa daerah lain di Jawa Tengah. Melihat kondisi tersebut maka perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. RPKD diharapkan menjadi acuan yang diharapkan mampu meningkatkan dukungan, komitmen dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kebupaten Kebumen untuk bersama-sama bersinergi dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini juga sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPKD adalah sebagai tata laksana dan acuan kebijakan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen.

Tujuan penyusunan RPKD adalah sebagai berikut:

a. Melakukan penyelarasan kebijakan penanggulangan kemiskinan pusat provinsi dan daerah.
b. Merumuskan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan.
c. Membangun komitmen bersama semua pemangku kepentingan baik pemerintah dan non pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
d. Meningkatkan koordinasi antar lembaga penanggulangan kemiskinan dan seluruh pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan.

e. Meningkatkan sinergitas dan efektivitas program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber anggaran lainnya.

1.3 Ruang Lingkup

RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan arah dan kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan selama 5 lima tahun. Adapun ruang lingkup dokumen RPKD meliputi:

a. Kondisi Umum Daerah;
b. Profil Kemiskinan;
c. Strategi, Program dan Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaga Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

1.5 Sistematika

RPKD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab II Kondisi Umum Daerah
Bab III Profil Kemiskinan
Bab IV Strategi, Program dan Lokasi Penanggulangan Kemiskinan
Bab V Penutup

BAB II
KONDISI UMUM DAERAH

2.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Jarak dari Kabupaten Kebumen ke Ibu Kota Provinsi mencapai 162 km. Letak geografis Kabupaten Kebumen berada di posisi 109°33'-109°50' Bujur Timur dan 7°27'-7°50' Lintang Selatan. Luas wilayahnya mencapai 1.281,12 km² dan memiliki garis pantai sepanjang 57,5 Km mulai dari Kecamatan Mirit sampai dengan Kecamatan Ayah. Secara administratif, Kabupaten Kebumen berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjarnegara di sebelah utara, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo di sebelah Timur dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Pembagian wilayah Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.991 dan 7.208 Rukun Tetangga (RT).

Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2019

Gambar II.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

Secara topografi, sekitar 61 persen wilayah Kabupaten Kebumen berada pada ketinggian 0-997,5 meter yaitu berupa pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan. Kemiringan tanah di Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

a) Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
b) Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
c) Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
d) Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.

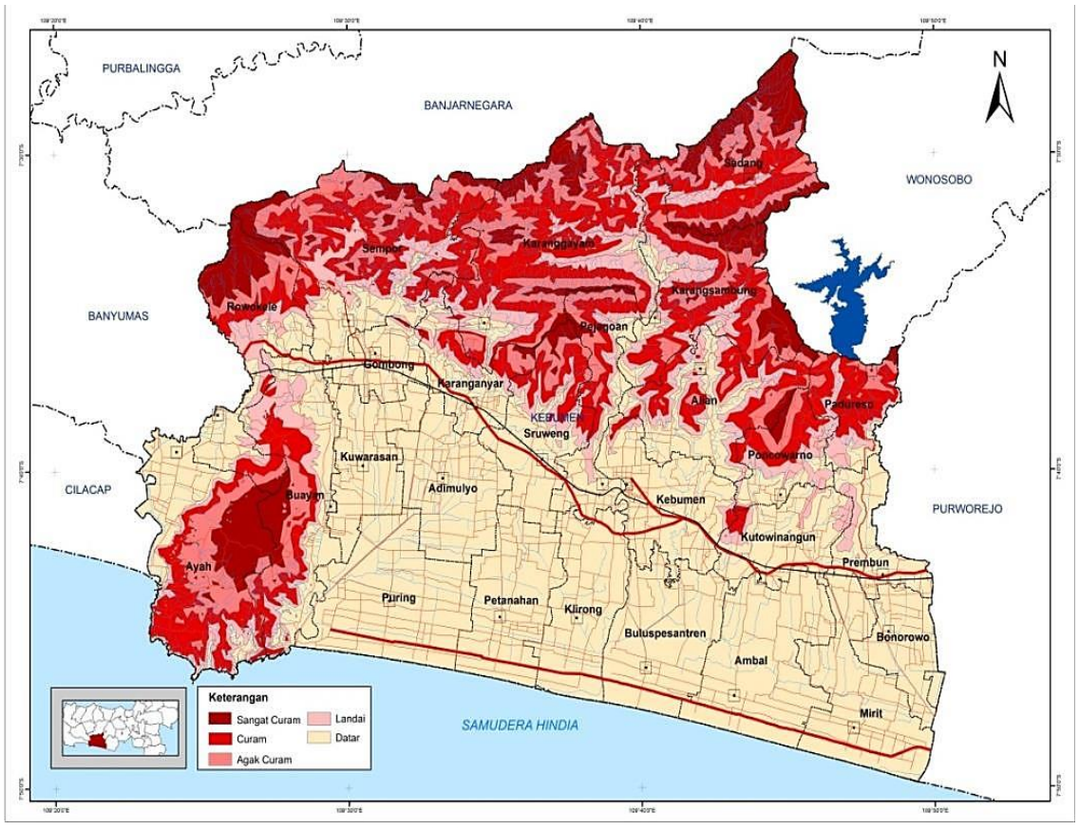

Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2018

Gambar II.2 Peta Topogragi Kebumen

2.1.1 Geologi

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah di Pulau Jawa yang tersusun oleh batuan Pra-Tersier (batuan tertua di Jawa berumur lebih dari 60 juta tahun yang lalu) dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Kebumen dapat diketahui bahwa batuan di daerah ini mulai dari yang tertua (*Paleosen*) hingga termuda (*Pliosen*) terdiri dari:

1. Kompleks Melange Luk Ulo yang berupa bongkah-bongkah batuan Pra-Tersier dengan massa dasar serpih hitam (berumur Kapur Atas);

2. Formasi Karangsambung yang tersusun oleh batu lempung bersisik dengan bongkah batu gamping, konglomerat, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur *Eosen*). Dalam formasi ini terdapat pula batu gamping terumbu yang berupa *olistolit*;
3. *Formasi Totogan* yang tersusun oleh breksi dengan komponen batu lempung, batu pasir, batu gamping dan basal (berumur *Oligo-Miosen*);
4. *Formasi Waturanda* yang tersusun oleh batu pasir kasar, makin ke atas berubah menjadi breksi dengan komponen andesit, basal dan massa dasar batu pasir tuf. Dalam formasi ini terdapat anggota tuf yang tersusun oleh perselingan tuf kaca, tuf kristal, batu pasir gampingan dan napal tufaan (berumur *Miosen* Awal);
5. *Formasi Penosogan* yang terdiri dari perselingan batu pasir gampingan, batu lempung, tuf, napal dan kalkarenit (berumur *Miosen* Tengah);
6. *Diabas* ialah batuan beku intrusi hasil aktivitas vulkanik (*Miosen* Tengah);
7. *Formasi Halang* yang tersusun oleh perselingan batu pasir, batu gamping, napal dan tuf dengan sisipan breksi (berumur *Pliosen*);
8. *Formasi Peniron* yang terdiri dari breksi dengan komponen andesit, batu lempung, batu gamping, serta massa dasar batu pasir tufan bersisipan tuf;
9. *Endapan Pantai* yang berupa pasir lepas; dan
10. *Alluvium* yang berupa lempung, lanau, pasir, kerikil dan kerakal.

2.1.2 Hidrologi

Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Terdapat tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Wilayah Kabupaten Kebumen dilalui oleh beberapa sungai/kali yang membentuk Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain Ijo, Luk Ulo, Telomoyo dan Wawar. Kondisi hidrologi dan geografi, dengan adanya Cekungan Air Tanah (CAT) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Kebumen berpotensi terjadinya banjir di beberapa tempat di Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Puring, Kecamatan Ayah dan Kecamatan Bonorowo. Selain sungai, tanah di Kabupaten Kebumen juga mengeluarkan banyak mata air yang mengalir

sepanjang tahun yang berada di 16 (enam belas) kecamatan yaitu Kecamatan Buayan, Pejagoan, Sruweng, Ayah, Rowokele, Kutowinangun, Prembun, Karanggayam, Karanganyar, Kebumen, Alian, Padureso, Karangsambung, Sadang, Sempor dan Poncowarno. Potensi mata air terbesar berada di Kecamatan Buayan dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) mata air. Sedangkan potensi air baku di Kabupaten Kebumen terdapat di DAS Wawar, DAS Luk Ulo, DAS Telomoyo, DAS Ijo dan Mata Air. Sebaran DAS di Kabupaten Kebumen tersaji dalam peta di bawah ini:

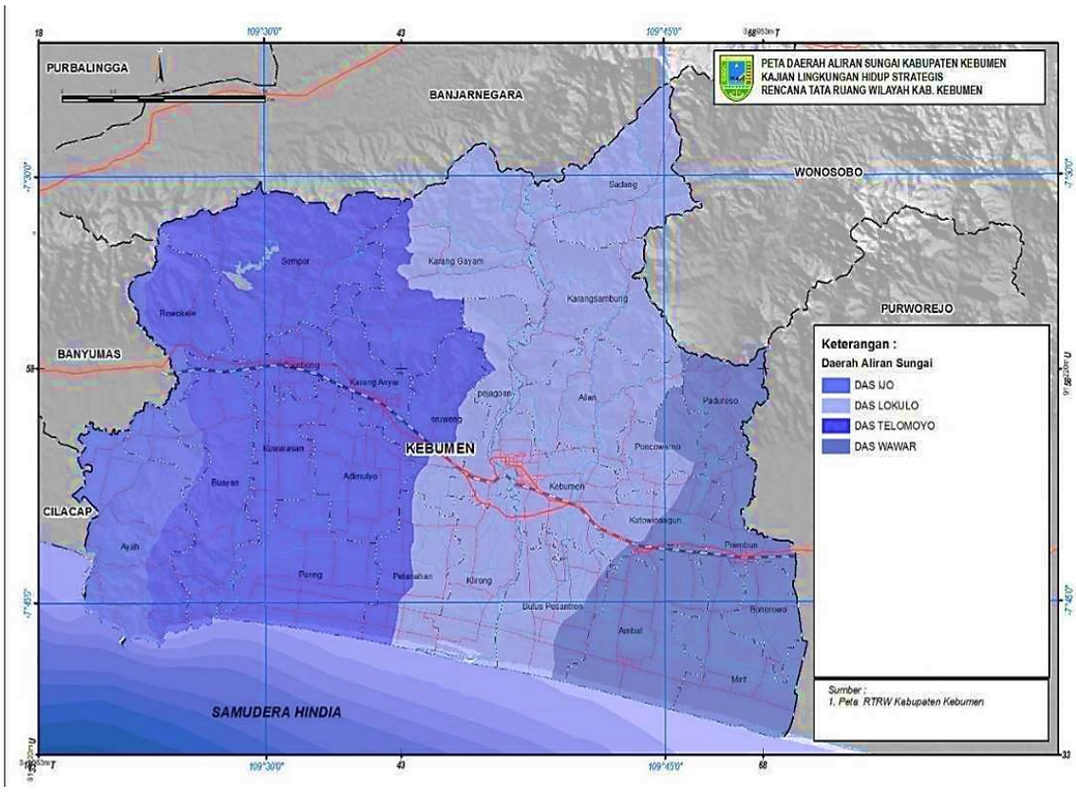

Sumber: BAPPEDA, Peta Revisi RTRW, 2018

Gambar II.3 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Kebumen

2.1.3 Klimatologi

Sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Kebumen terjadi dengan curah hujan yang fluktuatif tiap bulannya. Curah hujan tertinggi tercatat di bulan Maret yang mencapai 795 mm, sedangkan curah hujan terendah di bulan Juli yang terjadi hanya 58 mm

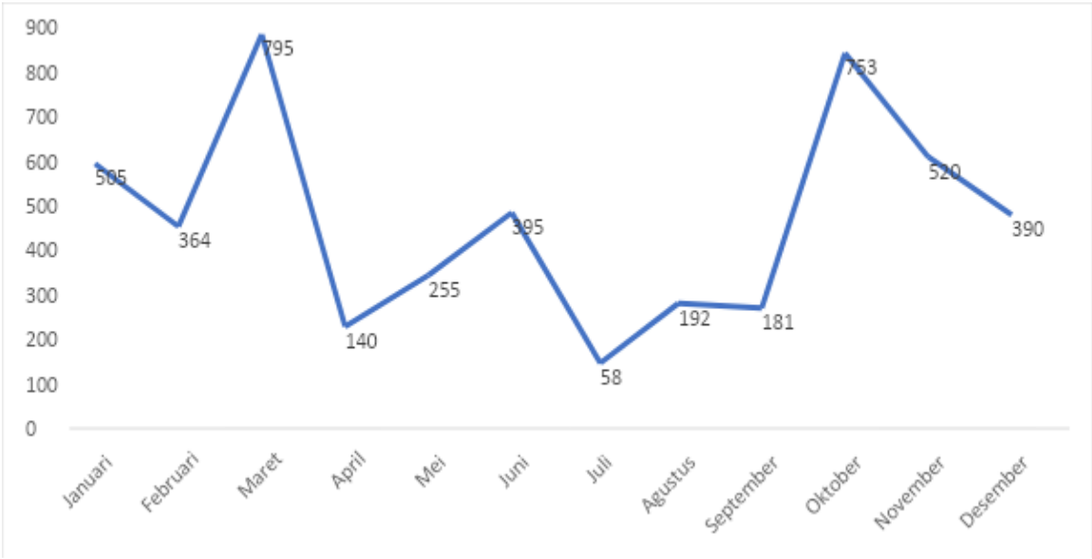

Gambar II.4 Jumlah Curah Hujan Menurut bulan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

2.1.4 Penggunaan Lahan

Kabupaten Kebumen memiliki beragam kawasan budidaya, yaitu berupa wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia. Kawasan Budidaya di Kabupaten Kebumen terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non-pertanian dengan peruntukan meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukkan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman; dan
i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan analisis citra satelit bagi dasar penyusunan revisi RTRW di Kabupaten Kebumen pada tahun 2019, luasan budidaya seluas 120.695,42 ha, dengan luas lahan produktif 59.723,48 ha dan tersebar di 26 kecamatan. Kecamatan Adimulyo, Puring, dan Bonorowo memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling besar, karena topografi wilayahnya terletak di daerah datar yang banyak memiliki sawah atau ladang. Sedangkan Kecamatan Rowokele, Sadang, dan Padureso memiliki persentase luas wilayah produktif yang paling kecil,

dikarenakan topografis wilayahnya pegunungan, jarang sawah atau ladang, namun banyak hutan yang dijadikan sebagai kawasan lindung.

Tabel II.1 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Kebumen (Ha)

No.	Uraian	2021
1	Luas Wilayah Produktif	59.723,48
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	120.695,42
3	Rasio	49,48%

Sumber: Bappeda Kab. Kebumen, 2019 data diolah

2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Perda Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 Wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan konservasi; kawasan lindung geologi; kawasan rawan bencana; kawasan cagar budaya; dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun rencana kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan hutan rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. kawasan pertambangan dan energi;
f. kawasan peruntukan industri;
g. kawasan pariwisata;
h. kawasan permukiman; dan
i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Kemudian sesuai amanat RTRW maka diperlukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagi wilayah perkotaan di Kabupaten Kebumen yang direncanakan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) dan pusat kegiatan lokal (PKL). Wilayah perkotaan tersebut yakni Perkotaan Kebumen, Prembun, Kutowinangun, Karanganyar dan Gombong. Penyusunan RDTR ditujukan sebagai pedoman pengembangan wilayah pada kawasan perkotaan yang lebih mendetail termasuk di dalamnya pengaturan mengenai zonasi. Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya untuk setiap blok/zona peruntukkan yang ditetapkan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Sampai dengan tahun 2022, telah disusun dokumen materi teknis untuk RDTR Prembun dan RDTR Kebumen dan masih berproses untuk menuju penetapan Perbup RDTR.

Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa disebut juga dengan Jalan Daendels adalah sebuah jalan lingkar sepanjang 130 km yang menghubungkan antara Kabupaten Kulonprogo, Purworejo, Kebumen dan Cilacap. Selain menjadi penghubung antar kabupaten, jalur ini juga menghubungkan pintu gerbang lalu lintas udara dan laut yaitu Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulonprogo, Bandara Tunggul Wulung dan Pelabuhan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap. Jalur Pansela yang melintasi wilayah Kabupaten Kebumen kurang lebih sepanjang 41 km, terbentang di pesisir pantai sepanjang 57,5 km. Adanya Jalur Pansela ini membuat akses dari dan ke Kabupaten Kebumen menjadi lebih mudah, sehingga diharapkan dapat menambah daya tarik investor maupun wisatawan untuk berkunjung dan menanamkan modalnya di Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana diatur dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2005 – 2025, Visi Kabupaten Kebumen yaitu “Kebumen yang Mandiri dan Sejahtera Berbasis Agrobisnis” merupakan tahun terakhir RPJPD pada periode RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 dimana pada Misi Ketiga yaitu Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, salah satu peluang yang ditangkap oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yaitu melalui pengembangan Kawasan peruntukan industri yang berlokasi di sebelah selatan JJLS, tepatnya di Desa Karanggadung Kecamatan Petanahan, Desa Tegalretno Kecamatan Klirong dan Desa Jogosimo Kecamatan Klirong.

Salah satu upaya untuk pemanfaatan kawasan adalah dengan pengembangan industri yang terintegrasi berbasis kelautan dan perikanan. Tahapannya diawali dengan penandatanganan kerjasama pembangunan kawasan perikanan budidaya (*Shrimp Estate*) antara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya pada Kementrian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada 12 Agustus

2021. Kawasan budidaya udang terintegrasi atau *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen merupakan yang pertama di Indonesia dan menjadi salah satu program strategis nasional tahun 2022 pada Kementrian Kelautan dan Perikanan. Tujuan dari pengembangan *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen adalah untuk meningkatkan produksi udang sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja. Dengan pengembangan kawasan budidaya udang ini diharapkan mampu meningkatkan keunggulan kompetitif daerah serta dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi masyarakat dalam peningkatan ekonomi, pengurangan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Jumlah serapan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan *shrimp estate* sebanyak 268 orang rata-rata per bulan selama periode Juni sampai dengan November 2022. Selain itu, jumlah serapan tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan tambak sebanyak 109 orang, terdiri dari 11 tenaga kerja administrasi dan 98 tenaga kerja lapangan.

Wilayah pesisir Kebumen berpotensi untuk pengembangan budidaya udang vaname secara terintegrasi, sehingga ditargetkan menjadi pelopor budidaya udang modern di Indonesia. Kondisi eksisting sebelum adanya pengembangan *shrimp estate* di Kebumen, berupa kawasan tambak udang masyarakat yang dilakukan secara tradisional. Luas lahan yang digunakan mencapai 50 Ha dengan tingkat produktivitas rata-rata 24-30 Ton/Ha/Tahun. Jumlah produksi yang dihasilkan per tahun mencapai 1.400 Ton atau senilai Rp.98.000.000.000. Adanya pengembangan budidaya udang terintegrasi melalui *shrimp estate* dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan diharapkan mampu meningkatkan produksi rata-rata menjadi 80 Ton/Ha/Tahun dengan kapasitas produksi mencapai 4.000 Ton/Tahun atau senilai Rp. 280.000.000.000. Adapun nilai investasi untuk pembangunan *shrimp estate* di Kabupaten Kebumen sepanjang Tahun 2022 sebagaimana data berikut:

Tabel II.2 Data Investasi *Shrimp Estate* di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

NO	URAIAN	NILAI (Rp)
1	Perencanaan	1.228.700.000
2	Pembangunan tambak	140.273.517.000
3	Pengawasan	1.642.646.820
4	Sarana dan prasarana penunjang	30.309.078.969
5	Operasional tambak	35.419.000.000

TOTAL	208.872.942.789

Sumber: Pengelola Shrimp Estate, 2022

Selain potensi yang ada di wilayah pesisir pantai, Kebumen memiliki kekayaan geologi yang bernilai tinggi. Didukung dengan keragaman hayati dan budaya menjadikan sebagian wilayah di Kabupaten Kebumen ditetapkan sebagai Geopark Nasional Karangsambung-Karangbolong (GNKK). Pada tahun 2022, GNKK dinobatkan sebagai kandidat yang akan diajukan oleh Pemerintah RI melalui Bappenas untuk menjadi UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan nama Geopark Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen memiliki komitmen untuk mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi lokal berkelanjutan. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama dengan DPRD adalah dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi (Geopark) Karangsambung-Karangbolong. Peraturan Daerah ini mengatur di antaranya tentang pemanfaatan dan peran serta masyarakat di kawasan Geopark. Pengembangan kawasan GNKK diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten Kebumen.

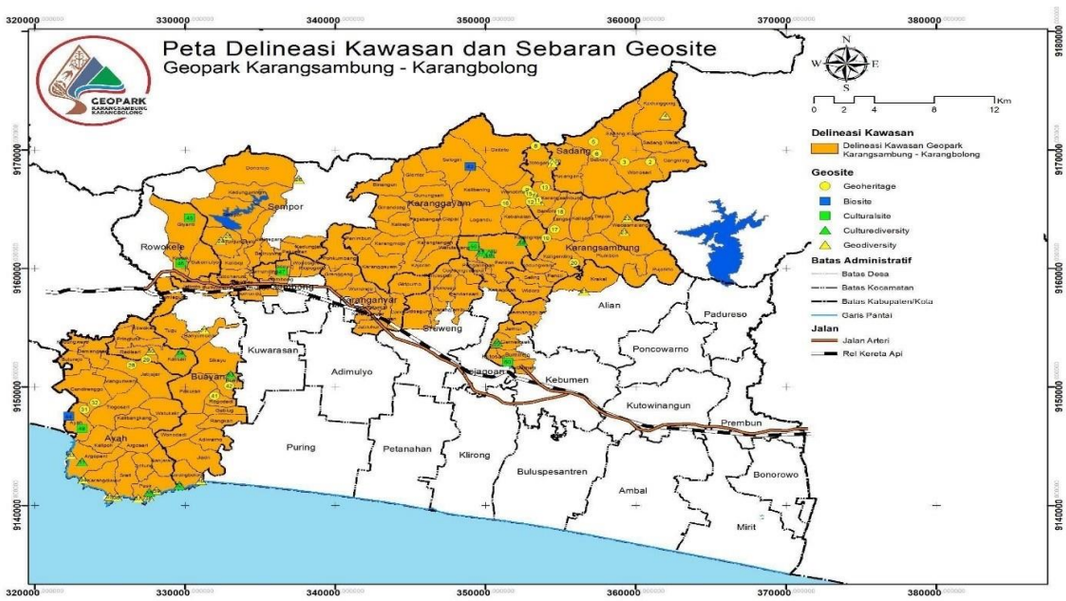

Sumber : Lampiran Perda Kab. Kebumen No.3 Tahun 2022

Gambar II.5 Peta Delineasi Kawasan Geopark Karangsambung – Karangbolong

2.3 Wilayah Rawan Bencana

Kondisi topografi yang beragam dan wilayah geologis yang dilewati cincin api, mengakibatkan potensi bencana alam di Kabupaten Kebumen cukup tinggi. Beberapa ancaman potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Kebumen antara lain gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca dan gelombang ekstrem serta abrasi. Bencana banjir sering terjadi di Kecamatan Adimulyo, Kebumen, Karanganyar, Buayan, Sruweng, Pejagoan, Prembun, Alian, Mirit dan Puring. Banjir dengan luas genangan dan durasi yang besar umumnya terjadi karena adanya tanggul sungai atau saluran irigasi yang jebol. Bencana banjir dengan klasifikasi tinggi sebesar 11,5%, klasifikasi sedang sebesar 21,7% dan klasifikasi rendah sebesar 66,8%. Selain itu, Kabupaten Kebumen memiliki potensi sekitar 18,66% yang rawan banjir bandang. Bencana banjir terbesar yang terjadi pada tahun 2022 yaitu di Desa Wadasmalang Kecamatan Karangsambung pada 9 Oktober 2022. Bencana ini terjadi akibat hujan dengan intensitas lebat sehingga menyebabkan air sungai kedung bener meluap ke permukiman warga. Dampak dari kejadian bencana ini menggenangi 18 (delapan belas) rumah warga dengan kerugian sebesar Rp.250.000.000,00 dan 1 (satu) orang meninggal dunia.

Berdasarkan topografi wilayah, Kebumen bagian utara cenderung terjal dan sangat terjal. Tingginya frekuensi kejadian longsor, mengakibatkan bencana tanah longsor sebagai salah satu prioritas dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Berdasarkan potensi bencana wilayah Kabupaten Kebumen dibagi menjadi 3 kategori. Bahaya longsor dengan klasifikasi tinggi luasnya mencapai 38.589,87 Ha atau 30,1%, bahaya longsor dengan klasifikasi sedang luasnya 24.663,87 Ha atau 19,3%, dan bahaya longsor dengan klarifikasi rendah luasnya 64.857,75 Ha atau 50,6% dari luas keseluruhan Kabupaten Kebumen. Ancaman bencana longsor banyak terjadi pada wilayah kecamatan yang memiliki topografi perbukitan dengan lereng yang terjal seperti di Kecamatan Alian, Sadang, Rowokele, Ayah, Buayan, Sempor, Padureso dan Karanggayam. Bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu di Desa Argopeni, Kecamatan Ayah. Bencana ini menimpa permukiman penduduk dengan kerugian mencapai Rp.240.000.000,00 dan 2 (dua) orang meninggal dunia.

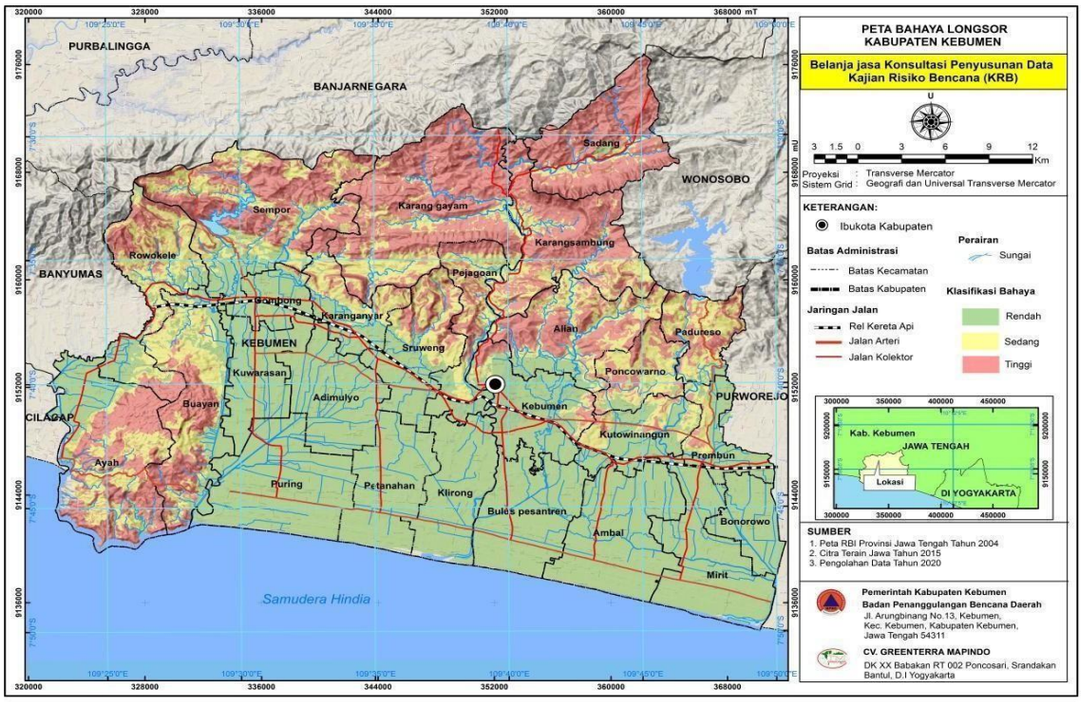

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar II.6 Peta Bahaya Tanah Longsor Kabupaten Kebumen

Ancaman bencana lain yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir. Wilayah dengan bahaya gelombang ektrem dan abrasi tinggi luasnya mencapai 620,18 Ha atau 0,48%. Wilayah dengan bahaya sedang luasnya 280,74 Ha atau 0,22%. Sedangkan wilayah dengan bahaya rendah luasnya mencapai 479,79 Ha atau 0,37% dari total wilayah Kabupaten Kebumen. Berdasarkan data kejadian gelombang pasang dan abrasi, wilayah pesisir Kabupaten Kebumen yang pernah terdampak bencana gelombang ekstrem dan abrasi antara lain Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan dan Ayah. Warga terdampak paling banyak adalah nelayan dan pedagang yang ada di sekitar pantai.

Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi berorientasi pada wilayah pesisir yang berhadapan langsung dengan laut. Kejadian gelombang tinggi antara 4 – 6 meter terjadi di Pantai Selatan Kebumen pada Agustus 2022, tepatnya di wilayah Pantai Suwuk dan Setrojenar. Kejadian ini mengakibatkan 100 warung semi permanen mengalami kerusakan namun tidak mengakibatkan korban jiwa.

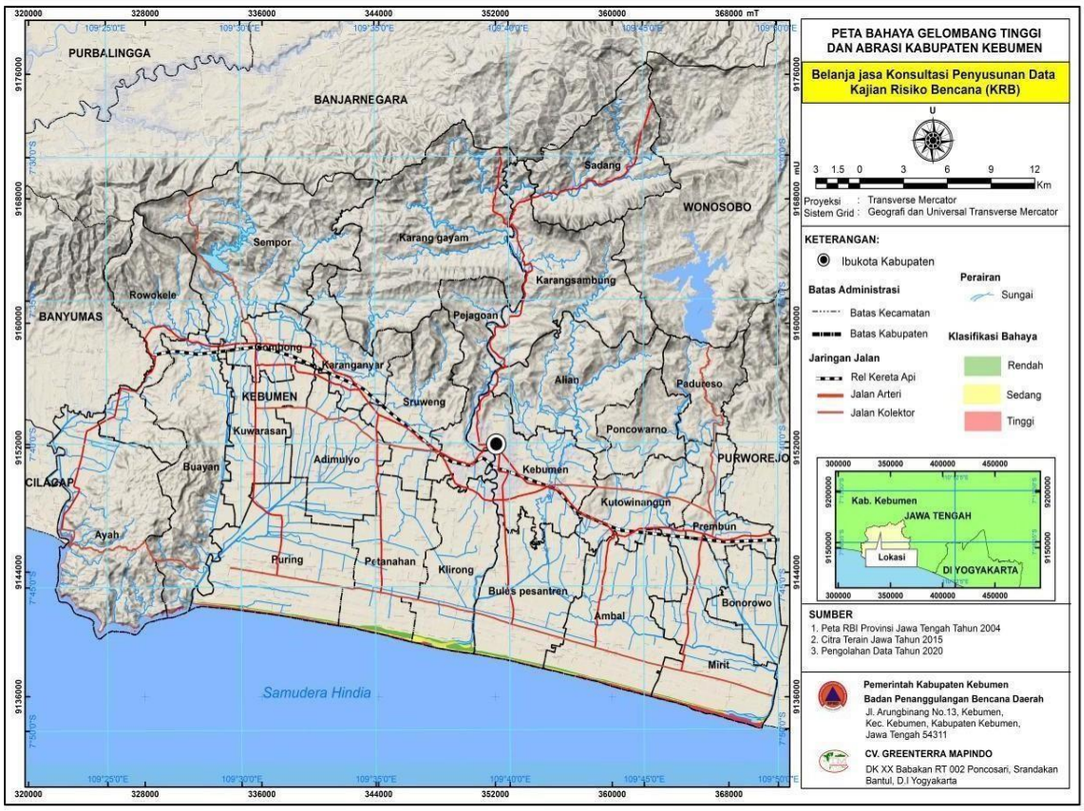

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2025

Gambar II.7 Jumlah Curah Hujan Menurut bulan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

2.4 Kondisi Demografi

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dipublikasikan melalui portal *gis.dukcapil.kemendagri.go.id*, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 adalah 1.421.143 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terbagi laki-laki sebanyak 720.789 jiwa dan perempuan sebanyak 700.354 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 466.372 KK. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Kebumen sebanyak 135.338 jiwa (9,52%), diikuti dengan Kecamatan Sempor sebanyak 72.509 jiwa (5,10%), dan Kecamatan Alian sebanyak 70.093 jiwa (4,93%). Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Kabupaten Kebumen adalah Kecamatan Padureso sebanyak 17.286 jiwa (1,22%), diikuti dengan Poncowarno sebanyak 19.418 jiwa (1,37%), dan Bonorowo sebanyak 22.503 jiwa (1,58%).

Tabel II.3 Jumlah Penduduk Menurut kecamatan di Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah (Jiwa)	Persentase Per kecamatan (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Ayah	34.135	33.236	67.371	4,74
2	Buayan	35.039	33.688	68.727	4,84
3	Puring	33.422	32.690	66.112	4,65
4	Petanahan	31.658	31.031	62.689	4,41
5	Klirong	33.667	32.674	66.341	4,67
6	Buluspesantren	31.163	30.073	61.236	4,31
7	Ambal	33.495	32.108	65.603	4,62
8	Mirit	28.312	27.351	55.663	3,92
9	Prembun	14.971	14.837	29.808	2,10
10	Kutowinangun	25.318	24.509	49.827	3,51
11	Alian	35.756	34.337	70.093	4,93
12	Kebumen	68.469	66.869	135.338	9,52
13	Pejagoan	29.045	27.935	56.980	4,01
14	Sruweng	32.236	31.625	63.861	4,49
15	Adimulyo	19.373	19.427	38.800	2,73
16	Kuwarasan	26.919	25.846	52.765	3,71
17	Rowokele	26.987	26.426	53.413	3,76
18	Sempor	36.764	35.745	72.509	5,10
19	Gombong	25.155	25.319	50.474	3,55
20	Karanganyar	19.382	19.045	38.427	2,70
21	Karanggayam	31.752	30.453	62.205	4,38
22	Sadang	12.308	11.620	23.928	1,68
23	Bonorowo	11.482	11.021	22.503	1,58
24	Padureso	8.750	8.536	17.286	1,22
25	Poncowarno	9.897	9.521	19.418	1,37
26	Karangsambung	25.334	24.432	49.766	3,50
		720.789	700.354	1.421.143	100

Sumber: gis.dukcapil.kemendagri.go.id, 2022

Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 tercatat sebanyak 1.109,30 jiwa/km^2. Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan Kebumen dengan kepadatan penduduk mencapai 3.219,27 jiwa/km^2, diikuti dengan Kecamatan Gombong 2.591,07 jiwa/km^2 dan Kecamatan Kutowinangun sebanyak 1.477,23 jiwa/km^2. Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu di Kecamatan Sadang dengan kepadatan penduduk sebanyak 441,23 jiwa/km^2, diikuti oleh Kecamatan Karanggayam sebanyak 569,17 jiwa/km^2 dan Kecamatan Padureso sebanyak 597,10 jiwa/km^2. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa wilayah kota memiliki

kecenderungan lebih padat dibandingkan wilayah perdesaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa, sebaran penduduk di Kabupaten Kebumen terkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Berdasarkan jenjang Pendidikan yang ditamatkan, penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 hanya ada 2,91% yang mengenyam pendidikan tinggi. Angka tersebut menunjukkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Kebumen masih tergolong rendah jika ditinjau dari jumlah lulusan perguruan tinggi. Namun demikian, rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kebumen menunjukkan tren positif selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel II.4 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Kebumen

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah lulusan S1	31.725	33.815	34.644	36.602	39.825
2.	Jumlah lulusan S2	1.086	1.204	1.253	1.344	1.542
3.	Jumlah lulusan S3	57	61	60	55	56
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	32.868	35.080	35.957	38.001	41.423
5.	Jumlah Penduduk	1.375.221	1.388.490	1.394.038	1.405.644	1.421.143
6.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (4/5)	2,39	2,53	2,58	2,70	2.91

Sumber : Disdukcapil, 2022

Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ini menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Struktur penduduk dapat memberikan kontribusi ekonomi pada suatu daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah harus tetap mengendalikan laju pertumbuhannya. Jika pertumbuhan penduduk tidak terkendali maka akan menjadi beban bagi pemerintah daerah, termasuk pada ketersediaan pangan dan daya dukung alam serta lingkungan.

Proporsi penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dengan kategori usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 977.603 orang dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebanyak 433.540 orang.

Data tersebut menggambarkan Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Kebumen sebesar 45,37%, artinya setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 45 hingga 46 orang yang masuk usia tidak produktif. Jika rasio ketergantungan tinggi, maka beban ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Semakin tinggi beban ketergantungan maka dampaknya adalah akan mengurangi produktivitas. Angka ini juga secara tidak langsung menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah, dimana kemajuan perekonomian daerah akan melambat.

Tabel II.5 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Usia <15 thn	317.028	315.694	317.928	317.595	297.631
Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	115.309	123.813	119.254	132.653	145.909
Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1 & 2)	432.337	439.507	437.182	450.248	443.540
Jumlah Penduduk Usia 15 s/d 64	942.884	948.983	962.794	966.721	977.603
Rasio Ketergantungan	45,85	46,31	45,41	46,57	45,37

Sumber : Disdukcapil, 2022

Selanjutnya jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur Tahun 2022, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Kebumen mengalami *ageing population*. Secara demografis penuaan penduduk dapat dilihat dari beberapa ukuran [2]. Secara detail dibagi menjadi 3 ukuran yaitu:

1. Rasio beban ketergantungan penduduk tua.
   Suatu penduduk dapat disebut sebagai penduduk tua jika angka ketergantungan penduduk tua sebesar 10 persen atau lebih (Kabupaten Kebumen 14,93%), atau jika ketergantungan penduduk muda sebesar 30 persen atau kurang (Kabupaten Kebumen 30,44%)
2. Persentase penduduk tua.
   Suatu penduduk dapat disebut sebagai penduduk tua ketika proporsi penduduk berumur 65 tahun ke atas telah di atas 7 persen (Kabupaten Kebumen 10,27%)

3. Umur median penduduk

Umur Median (*Median Age*)**,** adalah umur yang membagi penduduk penjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua daripada 'umur median'. Umur Median digunakan untuk menunjukkan klasifikasi struktur penduduk apakah termasuk "muda" atau "tua". Median umur "penduduk muda" adalah lebih kecil sama dengan 20 tahun, dan untuk median umur "penduduk tua" lebih besar sama dengan 30 tahun, sedangkan untuk median umur penduduk antara 20 – 30 tahun dikategorikan sebagai median umur "penduduk intermediate". Saat ini umur median penduduk Kabupaten Kebumen berada pada angka 30 – 34 tahun.

Berdasarkan konsep tersebut, Kabupaten Kebumen memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai *ageing population*. Jika dipersiapkan sejak dini dengan program-program yang bersifat *population responsive,* penuaan penduduk tidak akan menjadi masalah untuk Kabupaten Kebumen justru akan mendapatkan bonus demografi kedua. Para lansia dapat produktif lebih lama dan memberikan sumbangsih bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Kebumen.

Tabel II.6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Kebumen Tahun 2022

No	Kelompok umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	41.852	39.182	81.034
2	5-9	55.089	51.078	106.167
3	10-14	57.363	53.067	110.430
4	15-19	49.341	47.373	96.714
5	20-24	57.625	54.388	112.013
6	25-29	59931	54.505	114.436
7	30-34	57.462	52.220	109.682
8	35-39	54.554	49.621	104.175
9	40-44	52.139	49.175	101.314
10	45-49	45.726	45.407	91.133
11	50-54	43.521	45.650	89.171
12	55-59	40.162	44.069	84.231
13	60-64	36.293	38.441	74.734
14	65-69	27.546	29.161	56.707
15	70-74	18.712	19.192	37.904
16	75+	23.473	27.825	51.298
	Jumlah			1.421.143

Sumber : Disdukcapil, 2022

2.5 Kondisi Perekonomian

2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi riil keberhasilan aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Secara umum selama periode tahun 2018-2022 pergerakan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen memiliki pola yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 sebesar 5,79% meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 sebesar 3,69%. Secara komparatif dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional.

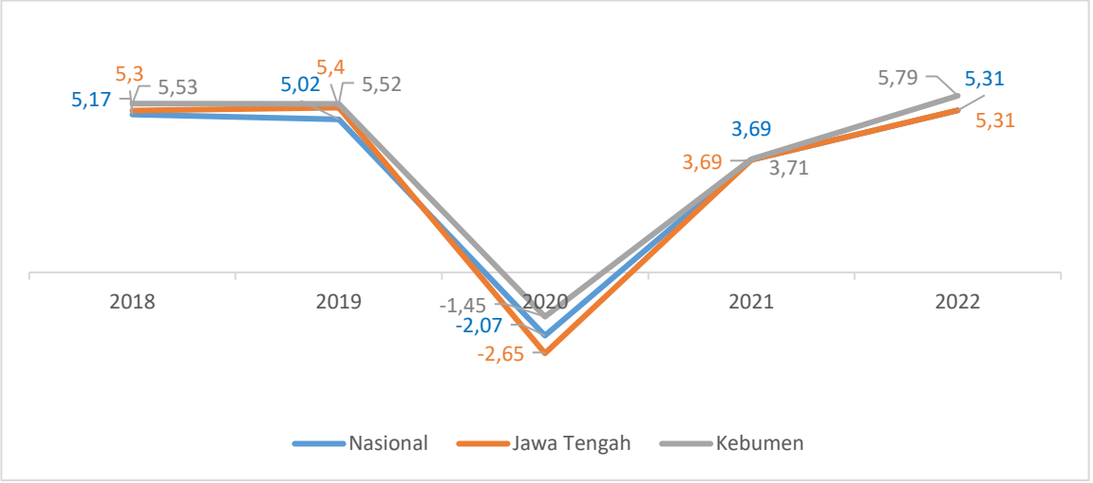

Gambar II.8 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

Jika dilihat dari pertumbuhan sectoral, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan tertinggi ada pada lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan yaitu 58,46%, disusul oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 28,31%, dan Jasa Lainnya sebesar 17,73%. Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan negatif yakni Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar -1,18%. Lapangan usaha transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum dapat tumbuh sejalan dengan tertanganinya kasus Covid-19 melalui program vaksinasi yang masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan perjalanan antar daerah.

Tabel II.7 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 (%)

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,77	-0,54	0,37	4,52	-1,18
B. Pertambangan dan Penggalian	3,18	3,24	2,41	0,96	0,02
C. Industri Pengolahan	5,79	7,18	0,67	3,07	6,84
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,76	7,2	1,58	4,6	5,10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,67	4,43	2,54	1,2	0,99
F. Konstruksi	4,2	5,08	-3,26	6,25	8,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,09	7,29	-3,81	6,26	1,63
H. Transportasi dan Pergudangan	5,7	7,78	-22,54	3,03	58,46
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,2	9,12	-6,84	5,9	28,31
J. Informasi dan Komunikasi	17,3	15,28	14,21	6,02	2,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,18	2,67	2,18	1,76	2,36
L. Real Estate	3,21	6,82	-0,06	1,44	6,74
M,N. Jasa Perusahaan	8,19	10,11	-7,47	2,32	4,32
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,3	3,95	-1,3	1,57	1,30
P. Jasa Pendidikan	9,72	8,24	-0,28	0,05	1,38
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,49	9,36	11,23	0,23	2,01
R,S,T,U. Jasa lainnya	9,33	10,78	-7,33	0,53	17,73
Produk Domestik Regional Bruto	5,53	5,52	-1,45	3,71	4,50

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2022.

Struktur PDRB Kabupaten Kebumen yang ditunjukkan dari distribusi setiap lapangan usaha pada PDRB di tahun 2022 masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 21,78%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 20,38%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,74%. Sementara itu distribusi terendah ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni sebesar 0,04%.

Tabel II.8 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,63	21,31	21,79	21,88	20,38
B. Pertambangan dan Penggalian	4,99	4,88	5,09	4,92	4,60
C. Industri Pengolahan	20,3	20,61	21,26	21,31	21,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04
F. Konstruksi	7,2	7,26	7,05	7,38	7,77
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,01	15,35	14,84	15,18	14,74
H. Transportasi dan Pergudangan	4,07	4,16	3,31	3,35	5,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,1	2,17	2,04	2,08	2,55
J. Informasi dan Komunikasi	2,05	2,23	2,55	2,56	2,38
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,9	2,82	2,88	2,89	2,88
L. Real Estate	1,21	1,22	1,22	1,18	1,16
M,N. Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,36	0,35	0,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,29	3,24	3,23	3,08	2,90
P. Jasa Pendidikan	10,08	10,41	10,42	10,02	9,30
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,22	1,38	1,33	1,24
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,53	2,64	2,47	2,37	2,67
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2022

Jika dilihat dari nilai PDRB berdasarkan lapangan usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2010, diketahui bahwa nilai PDRB ADHK tahun 2022 sebesar 21.425.793,42 miliar rupiah meningkat dari tahun 2021 sebesar 20.253,06 miliar rupiah.

Tabel II.9 Nilai PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.062.872,24	4.040.876,86	4.055.807,44	4.239.152,12	4.189.036,42
B. Pertambangan dan Penggalian	797.139,28	822.954,34	842.752,08	850.877,10	851.047,28
C. Industri Pengolahan	3.674.033,78	3.937.651,39	3.963.952,93	4.085.490,86	4.365.019,99
D. Pengadaan Listrik dan Gas	14.353,08	15.386,85	15.630,46	16.349,67	17.182,85
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.242,63	10.696,48	10.968,55	11.100,23	11.209,74
F. Konstruksi	1.363.384,02	1.432.590,22	1.385.896,59	1.472.570,77	1.599.211,86
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.136.740,48	3.365.541,07	3.237.426,24	3.440.109,19	3.496.212,35
H. Transportasi dan Pergudangan	871.456,93	939.299,67	727.555,62	749.636,55	1.187.864,85
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	433.326,51	472.854,53	440.494,34	466.497,25	598.582,34
J. Informasi dan Komunikasi	565.998,28	652.458,93	745.170,06	790.000,20	808.565,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	513.607,34	527.338,87	538.860,89	548.322,26	561.273,86
L. Real Estate	268.515,73	286.827,46	286.655,36	290.795,36	310.394,97
M,N. Jasa Perusahaan	66.184,97	72.877,75	67.436,49	69.000,92	71.981,76
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	598.428,66	622.066,59	613.989,23	623.610,44	631.717,38
P. Jasa Pendidikan	1.649.453,69	1.785.398,27	1.780.474,28	1.781.437,98	1.806.021,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222.666,84	243.509,75	270.855,89	271.484,78	276.930,60
R,S,T,U. Jasa lainnya	529.644,04	586.733,59	543.738,50	546.623,75	643.540,14
Produk Domestik Regional Bruto	18.778.048,50	19.815.062,62	19.527.664,95	20.253.059,43	21.425.793,42

Sumber: BPS Kab. Kebumen 2022

Nilai PDRB tahun 2022 berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah sebesar 32.601.944,7 miliar rupiah atau meningkat dari tahun 2021 sebesar 29.563,14 miliar rupiah.

Tabel II.10 Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.891.457,93	5.954.101,58	6.105.107,94	6.469.211,83	6.643.283,90
B, Pertambangan dan Penggalian	1.299.758,75	1.362.202,83	1.424.906,39	1.454.544,00	1.500.371,24
C, Industri Pengolahan	5.285.119,95	5.757.733,84	5.956.770,04	6.299.969,84	7.101.867,11
D, Pengadaan Listrik dan Gas	17.456,32	18.734,45	18.912,40	19.665,06	20.888,46
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.326,06	12.058,72	12.911,21	13.200,54	13.553,80
F, Konstruksi	1.875.163,76	2.028.339,12	1.975.139,60	2.181.318,08	2.532.426,03
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.907.499,01	4.288.353,41	4.157.585,07	4.487.261,96	4.805.470,57
H, Transportasi dan Pergudangan	1.058.888,39	1.161.122,50	927.668,84	990.514,94	1.690.483,29
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	547.529,68	606.538,07	570.542,17	616.018,66	831.655,05
J, Informasi dan Komunikasi	532.807,14	623.994,52	714.059,50	757.250,00	775.122,88
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	755.284,17	788.299,40	806.819,75	853.342,46	939.806,35
L, Real Estate	313.946,81	340.990,76	341.523,26	349.855,69	379.186,88
M,N, Jasa Perusahaan	93.706,67	106.050,99	100.255,97	103.710,77	114.152,40
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	856.928,86	904.304,56	905.062,04	910.903,26	945.352,25
P, Jasa Pendidikan	2.625.309,06	2.907.297,36	2.918.317,40	2.963.036,01	3.032.069,94
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	305.072,16	340.268,68	387.883,94	392.340,56	405.493,45
R,S,T,U, Jasa lainnya	659.761,94	736.268,86	691.440,18	701.000,38	870.761,10
Produk Domestik Regional Bruto	26.037.016,66	27.936.659,65	28.014.905,70	29.563.144,02	32.601.944,70

Sumber: BPS Kab. Kebumen 2022

Jika dilihat dari sisi pengeluaran pada tahun 2022, semua komponen mengalami pertumbuhan positif sejak tahun 2018. Kenaikan tertinggi dicatat oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yaitu sebesar 5,84%, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 4,80%.

Tabel II.11 Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

[Seri 2010] PDRB Menurut Pengeluaran	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,14	4,22	-0,83	2,08	5.84
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,22	11,7	-4,27	1,75	4.80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,88	3,53	-4,01	1,25	0.88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,52	4,31	-7,68	6,82	2.33
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,53	5,52	-1,45	3,71	5.79

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2022

Struktur PDRB Kabupaten Kebumen dari sisi pengeluaran pada tahun 2022 juga tidak mengalami perubahan yang berarti. Perekonomian Kabupaten Kebumen masih didominasi oleh Komponen Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 73,07%, dan diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 19,64%. Bahkan selama kurun waktu tahun 2018-2022 perekonomian Kabupaten Kebumen menurut pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan kontribusi lebih dari separuh nilai PDRB. Sementara itu komponen Net Ekspor Barang dan Jasa masih terus terkontraksi meski besarannya terus berkurang. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekonomi Kabupaten Kebumen sangat tergantung pada pengeluaran konsumsi rumah tangga, meskipun tren kontribusinya fluktuatif dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.12 Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2021

[Seri 2010] PDRB Menurut Pengeluaran	[Seri 2010] Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,54	73,61	73,94	72,86	73.07
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,78	1,90	1,85	1,83	1.80
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,63	9,28	8,87	8,76	8.10
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,20	21,43	19,79	20,37	19.64
Perubahan Inventori	2,03	1,86	2,92	1,89	2.21

[Seri 2010] PDRB Menurut Pengeluaran	[Seri 2010] Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Net Ekspor Barang dan Jasa	-8,19	-8,08	-7,36	-5,70	-4.81
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2022

Tabel II.13 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

[Seri 2010] PDRB Menurut Pengeluaran	[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	19.148.858,34	20.562.971,58	20.715.265,57	21.538.268,67	23.821.151,97
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	464.253,39	531.150,08	517.264,28	540.898,52	586.861,65
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.507.463,43	2.593.445,82	2.484.186,22	2.590.023,42	2.639.749,49
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.519.463,30	5.986.165,25	5.543.124,20	6.022.328,52	6.401.952,77
Perubahan Inventori	529.457,34	520.801,82	817.140,18	557.913,56	721.891,31
Net Ekspor Barang dan Jasa	(2.132.479,15)	(2.257.874,90)	(2.062.074,75)	(1.686.288,67)	(1.569.662,49)
PDRB	26.037.016,66	27.936.659,65	28.014.905,70	29.563.144,02	32.601.944,70

2.5.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan besaran pendapatan rata-rata penduduk pada suatu daerah yang menjadi tolok ukur tingkat kemakmuran penduduk dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah menunjukkan semakin tingginya penghasilan setiap penduduk sehingga semakin tinggi pula daya beli masyarakat. Pendapatan per kapita Kabupaten Kebumen masih cukup jauh di bawah pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan perkapita di Kabupaten Kebumen mengalami fluktuasi walau tidak dalam jarak yang terlalu besar. Penurunan terjadi pada tahun 2020 sebesar -11,2%. Namun pada tahun 2021 pendapatan perkapita kembali naik dengan peningkatan 4,37% dan kembali meningkat 9,07% pada tahun 2022.

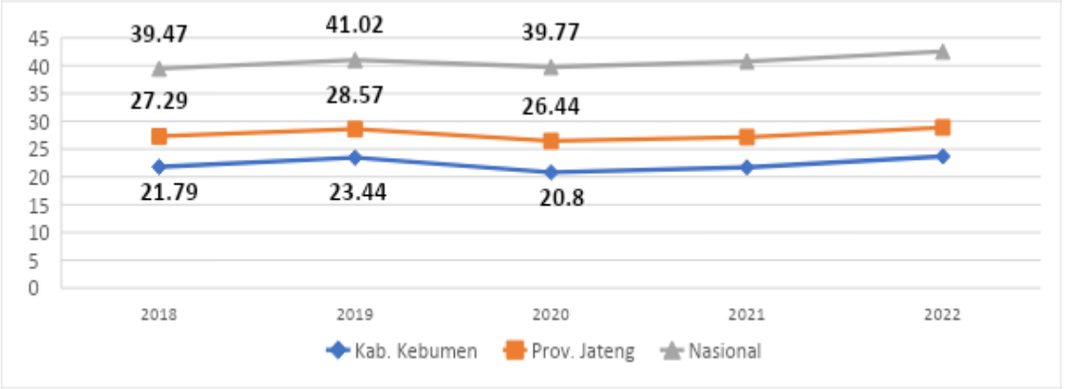

Sumber: BPS, 2022

Gambar II.9 PDRB Perkapita Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

2.5.3 Ketimpangan Pendapatan

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan. 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan persentase jumlah pendapatan dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya bagian pendapatan yang dinikmati oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut:

1. Tingkat ketimpangan rendah jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah pendapatan.
2. Tingkat ketimpangan moderat jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17% jumlah pendapatan.
3. Tingkat ketimpangan tinggi jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12% jumlah pendapatan

Tabel II.14 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (Persen)
Tahun 2020 – 2022

2020			2021			2022		
40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas	40% Bawah	40% Tengah	20% Atas
43,74	41,93	39,45	37,55	38,38	40,16	19,86	36,39	43,75

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan kriteria tersebut, ketimpangan pendapatan Kabupaten Kebumen Tahun 2022 berada pada angka19,86% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan rendah.

2.5.4 Penanaman Modal

Penanaman Modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia (Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Peran Investasi begitu penting karena merupakan salah satu indikator yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor. Dengan pertumbuhan investasi diharapkan mampu meningkatkan perekonomian terutama usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja bagi masyarakat Kebumen. Pada Tahun 2022 capaian indikator kinerja urusan penanaman modal mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai investasi pada tahun 2022 sebesar 564,64 Milyar atau mengalami peningkatan sebesar 15,56% dibandingkan dengan tahun 2021. Sektor usaha yang paling banyak melakukan investasi di Tahun 2022 meliputi sektor perdagangan dan reparasi sebesar 226,23 milyar, Jasa Lainnya sebesar 108,34 milyar, sektor konstruksi sebesar 71,12 milyar, dan transportasi, gudang dan komunikasi sebesar 43,32 milyar. Jumlah serapan tenaga kerja dari total investasi di Tahun 2022 sebanyak 18.047 orang dengan jumlah proyek sebanyak 7.884. Berikut capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2018 sampai 2022.

Tabel II.15 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

NO	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase peningkatan investasi	46,70 %	81,88 %	-56,21%	25,70%	15,56%

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kebumen, 2023.

BAB III
PROFIL KEMISKINAN

Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan [3]. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal. Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Profil kemiskinan Kabupaten Kebumen tahun 2018-2022 menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen selama kurun waktu 2018-2019 mengalami penurunan sebesar 0,65%. Adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan tahun 2021 sedikit banyak berdampak pada menurunnya aktivitas perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan pada kurun waktu tersebut meningkat sebesar 0,77% pada tahun 2020 dan 0,24% pada tahun 2021. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian pasca turunnya kasus Covid-19 pada tahun 2022, tingkat kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan yang tergambar dari penurunan angka kemiskinan sebesar 1,42%. Capaian ini sudah sesuai dengan target penurunan angka kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu sebesar 16,00%-17,00%.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Kebumen mengalami tren kenaikan. Kenaikan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin jauh dari garis kemiskinan. Kondisi ini mencerminkan bahwa kenaikan Garis

Kemiskinan tidak diikuti dengan kenaikan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin secara linier yang menyebabkan jarak antara pengeluaran masyarakat miskin semakin jauh dengan Garis Kemiskinan. Kenaikan Garis Kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari kenaikan harga-harga kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok. Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat menjadi hal yang seharusnya dilakukan dalam rangka mengendalikan peningkatan Garis Kemiskinan. Selain itu, kenaikan Indeks Keparahan Kemiskinan mencerminkan semakin tingginya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel III.1 Profil Kemiskinan Kabupaten Kebumen Tahun 2018-2022

Profil Kemiskinan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	208.700	201.340	211.090	212.900	196.160
Persentase Penduduk Miskin	17,47 %	16,82 %	17,59 %	17,83 %	16,41 %
Garis Kemiskinan	342,437	362,847	380.557	390.599	416.004
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,48	2,58	2,62	3,24	3,41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,55	0,65	0,55	0,88	1,02

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia,BPS, 2022

Jika dilihat perbandingan kinerja penurunan angka kemiskinan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, Kabupaten Kebumen menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik. Kinerja penurunan kemiskinan ini akan terus didorong sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Upaya penanggulangan kemiskinan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah baik peningkatan kualitas pendataan kemiskinan maupun penentuan program penanggulangan kemiskinan. Kinerja penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional selama Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.2 Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022

Uraian	% Penduduk Miskin					% Penurunan 2021-2022
	2018	2019	2020	2021	2022	
Kebumen	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	1,42
Jawa Tengah	11,32	10,80	11,41	11,79	10,93	0,86
Nasional	9,82	9,41	9,78	10,14	9,54	0,6

Sumber: Katalog Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota di Indonesia, BPS, 2022

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah berkomitmen untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024. Kemiskinan Ekstrem di definisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu setara dengan USD 1,9 PPP *(Purchasing Power Parity).* Kemiskinan Ekstrem diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten supaya dapat di bandingkan antar negara dan antar waktu.

Tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan sebesar 0,99% dari semula 4,42% pada Tahun 2021 menjadi 5,51% pada Tahun 2022 yang merupakan angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data, tingkat kemiskinan secara umum di Kabupaten Kebumen mengalami penurunan (1,42%). Di sisi lain tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kebumen mengalami kenaikan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pergeseran sebagian penduduk miskin menjadi tidak miskin, namun di sisi lain semakin banyak penduduk miskin yang masuk kedalam kategori miskin ekstrem.

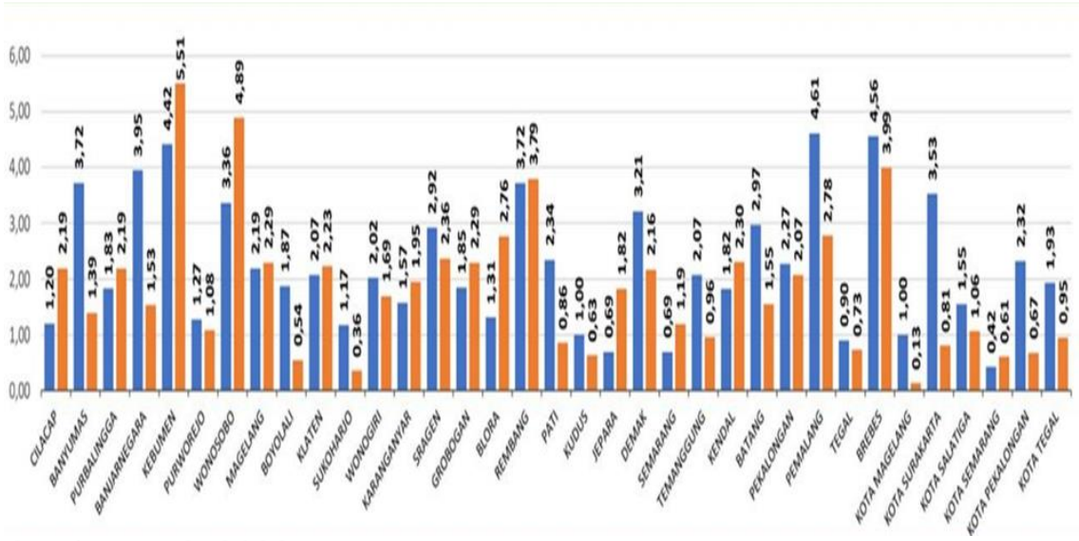

Sumber: BPS, 2022

Gambar III.1 Profil Kemiskinan Ekstrem Jawa Tengah Tahun 2022

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengeluarkan data kemiskinan ekstrem yang bersumber dari pendataan keluarga oleh BKKBN yang dilengkapi dengan peringkat kesejahteraan penduduk/rumah tangga yang disebut data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Data P3KE ditujukan untuk melengkapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan meningkatkan akurasi pensasaran program kemiskinan, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin yang belum mendapat program (*exclusion error*). Data agregat kemiskinan ekstrem per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III.3 Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2022

No.	Kecamatan	KK Desil 1	Peringkat	Individu Desil 1	Peringkat	Persentase Desil 1	Peringkat
1	Ayah	1.863	17	8.888	17	13,77%	25
2	Buayan	3.129	7	13.842	9	21,16%	16
3	Puring	2.737	11	12.458	13	19,61%	18
4	Petanahan	2.562	15	11.717	14	19,48%	20
5	Klirong	3.116	8	14.326	6	22,40%	13
6	Buluspesantren	2.730	12	12.572	12	21,49%	15
7	Ambal	3.606	4	16.397	5	26,31%	7
8	Mirit	2.575	14	11.658	15	22,39%	14
9	Prembun	1.214	22	5.564	23	19,49%	19

No.	Kecamatan	KK Desil 1	Peringkat	Individu Desil 1	Peringkat	Persentase Desil 1	Peringkat
10	Kutowinangun	2.452	16	11.269	16	23,56%	10
11	Alian	3.504	5	17.052	4	25,57%	9
12	Kebumen	4.627	1	22.441	1	16,97%	22
13	Pejagoan	2.677	13	12.743	11	23,05%	12
14	Sruweng	3.019	9	14.150	8	23,11%	11
15	Adimulyo	1.199	23	5.618	22	15,07%	24
16	Kuwarasan	1.777	18	8.455	18	16,73%	23
17	Rowokele	3.207	6	14.272	7	28,05%	5
18	Sempor	4.415	3	19.550	3	28,45%	3
19	Gombong	1.372	21	6.162	21	12,27%	26
20	Karanganyar	1.554	19	6.856	19	18,33%	21
21	Karanggayam	4.457	2	19.790	2	33,71%	1
22	Sadang	1.509	20	6.494	20	28,70%	2
23	Bonorowo	913	26	4.173	26	19,77%	17
24	Padureso	987	25	4.259	25	25,67%	8
25	Poncowarno	1.011	24	4.918	24	26,89%	6
26	Karangsambung	2.886	10	13.349	10	28,24%	4
	Jumlah	**65.098**		**298.973**		**21,95%**	

Sumber : Kemenko PMK, 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa jumlah keluarga dan individu miskin ekstrem terbanyak ada di Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Alian. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, persentase kemiskinan ekstrem tertinggi berada di Kecamatan Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sadang, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung dan Kecamatan Rowokele.

BAB IV
STRATEGI, PROGRAM DAN LOKASI PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil;
d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;dan
e. melakukan perbaikan data penduduk miskin.

4.2 Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha,serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Secara umum program penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi 3 (tiga) program yaitu:

a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan

c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

4.3 Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka mencapai target penghapusan kemiskinan esktrem hingga 0% pada tahun 2024, pemerintah pusat menetapkan lokus kemiskinan ektrem menjadi 3 tahapan. Tahapan I yang dilaksanakan hingga akhir 2021, pemerintah menetapkan tujuh provinsi prioritas, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Selanjutnya, dari provinsi prioritas tersebut dipilih lima kabupaten/kota, sehingga total wilayah prioritas tahap I berjumlah 35 kabupaten/kota. Penentuan 35 kabupaten/kota tersebut berdasarkan indeks kemiskinan ekstrem yang dirancang untuk mewakili sekitar 20% penduduk miskin ekstrem atau 2,1 juta jiwa dari total 10,4 juta penduduk miskin ekstrem secara nasional. Pada tahap ke II, cakupan dari penduduk miskin ekstrem di wilayah prioritas diperluas agar mewakili sekitar 75% penduduk miskin ekstrem secara nasional yang meliputi 212 kabupaten/kota. Adapun untuk implementasi tahap III pada 2023-2004, model konvergensi dilakukan secara nasional dan menyeluruh di 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Sesuai dengan tahapan di tingkat pusat, lokus kemiskinan esktrem pada tahun 2021 di Kabupaten Kebumen ada di 25 desa di 5 kecamatan yaitu di Kecamatan Alian, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sadang, dan Kecamatan Karangsambung. Pada tahap selanjutnya, sebagai bagian dari tahap akhir penghapusan kemiskinan ekstrem maka intervensi dilakukan secara menyeluruh di wilayah di Kabupaten Kebumen.

Lampiran Program Matrik Program/Kegiatan/Subkegiatan

MATRIK PROGRAM PENANGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2021-2026 KABUPATEN KEBUMEN

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
DISDIKPORA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	860,000,000	830,000,000	848,400,000	1,260,000,000	1,260,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90,999,500,000	97,655,300,000	97,655,300,000	101,023,938,000	101,993,788,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	805,000,000	738,798,000	1,872,668,000	1,176,000,000	1,180,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	37,962,500,000	60,160,721,000	49,179,600,000	40,135,315,000	40,520,614,000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	20,979,000,000	21,425,400,000	21,425,400,000	21,180,400,000	21,180,400,000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		0	0	-	-
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1,504,900,000	2,367,300,000	2,367,300,000	2,233,025,000	2,233,025,000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	92,008,000	91,286,000	91,286,000	100,539,000	100,539,000
DISPERKIMHUB	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	240,000,000	1,935,590,000	1,700,000,000	4,250,000,000	4,250,000,000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2,848,926,000	2,022,766,000	3,208,347,000	5,400,000,000	5,400,000,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	900,125,000	302,765,000	300,000,000	775,000,000	775,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,960,849,000	9,336,773,000	9,689,135,000	6,501,813,000	6,111,023,000
DLHKP	PROGRAM PENGELOLAAN	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan	31,000,000		63,232,960	30,000,000	30,000,000
DINKES PPKB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan	Pengelolaan Jaminan Kesehatan	23,282,690,000	28,179,194,000	44,101,583,625	28,500,000,000	28,500,000,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	110,000,000	75,000,000	129,618,000	378,635,000	378,635,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,026,229,000	2,114,197,000	46,362,000	1,720,203,000	1,720,203,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1,037,851,000	667,815,000	88,000,000	3,686,276,000	3,701,276,000

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	484,560,000	494,104,000	35,000,000	801,304,000	804,304,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	5,243,402,000	1,176,231,000	45,000,000	4,805,340,000	4,805,340,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,048,641,000	1,007,512,000	20,792,000	1,036,423,000	1,036,423,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6,695,196,000	1,745,773,000	1,235,796,000	4,301,394,000	4,345,294,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1,628,391,000	1,684,477,000	30,000,000	1,628,705,000	1,638,705,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	700,690,000	716,798,000	35,000,000	332,389,000	342,369,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	563,988,000	600,821,000	40,000,000	367,177,000	378,192,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	892,442,000	852,315,000	40,000,000	1,270,252,000	1,275,252,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,569,324,000	773,953,000	1,146,640,000	2,883,228,000	2,873,228,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	965,353,000	534,712,000	415,000,000	859,771,000	879,771,000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4,665,021,000	1,878,018,000	349,479,000	4,020,591,000	4,030,591,000
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	1,321,667,000	3,463,701,000	3,346,185,780	-	-
DINSOS P3A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	761,000,000	844,145,000	844,145,000	1,798,225,000	1,834,189,000
			Penyediaan Alat Bantu	130,000,000	105,000,000	115,614,000	111,394,000	114,735,000
			pemberian akses ke layanan pendidikan	212,400,000	190,000,000	190,000,000	318,270,000	327,818,000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	penyediaan sandang	20,000,000	90,000,000	100,000,000	130,000,000	140,000,000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Penyediaan Makanan	388,600,000	206,336,000	206,336,000	220,000,000	225,000,000
			Penyediaan Sandang	193,631,000	90,760,000	90,760,000	98,133,000	101,076,000

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	375,000,000	350,308,000	184,022,000	901,765,000	928,817,000
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	100,000,000	123,107,000	133,640,000	212,180,000	218,545,000
			Pelayanan Dukungan Psikososial	47,100,000	44,516,000	51,266,000	106,090,000	109,272,000
DISTAPANG	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	250,000,000	241,000,000	244,533,000	510,037,000	515,037,000
BAG. HUKUM SETDA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	368,903,000	309,447,000	310,000,000	440,520,000	453,736,000
BAG. KESRA SETDA	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2,245,000,000	2,245,000,000	2,168,359,000	8,084,460,000	8,317,994,000
BPKPD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	41,328,000,000	41,328,000,000	41,328,000,000	41,328,000,000	41,328,000,000
KECAMATAN	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	Fasilitasi Penyusunan Program dan	-	1,817,460,000	-	-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			1,817,460,000	1,817,460,000	1,817,460,000
SATPOL PP	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Berkuasa Hak Asasi Manusia	95,500,000	76,400,000	226,400,000	71,220,000	104,355,000
Meningkatkan pendapatan masyarakat								
DLHKP	PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana	3,649,413,000	232,055,000	2,156,695,900	3,659,868,000	3,949,868,000
DISNAKER	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	294,100,000	160,000,000	176,705,710	376,992,000	388,302,000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	830,628,285	384,152,000	517,775,000	14,322,000,000	9,674,940,000
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	106,531,000	50,000,000	50,000,000	153,831,000	158,446,000
DISPARBUD	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Pengelolaan Kawasan Strategis	Pemberdayaan Masyarakat dalam	650,000,000	200,000,000	140,000,000	377,500,000	339,515,000
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	130,000,000	3,657,860,000	2,420,786,000	1,100,000,000	1,200,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi	3,488,746,000	180,000,000	632,035,890	2,001,390,000	2,099,183,000
DISTAPANG	PROGRAM PENINGKATAN	Penyediaan dan Penyaluran Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan	222,000,000	92,566,000	103,701,960	272,860,000	280,360,000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Peningkatan Kualitas SDG	1,976,000,000	8,424,240,000	5,462,206,960	9,896,628,000	9,896,628,000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	325,000,000	478,966,000	483,751,980	814,590,000	821,840,000
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,	176,204,000	190,130,000	90,256,980	436,221,000	449,308,000

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
DISPERINDAG KUKM	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	684,739,000	800,000,000	800,000,000	364,992,000	375,942,000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	75,000,000	88,000,000	95,500,000	75,000,000	13,500,000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100,000,000	123,000,000	160,080,000	1,400,000,000	1,400,000,000
Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan								
DISTAPANG	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2,516,435,000	739,852,000	1,028,976,000	8,952,817,000	9,082,951,000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3,050,007,000	2,563,000,000	4,723,976,000	1,420,345,000	1,888,972,000
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1,600,000,000	766,000,000	3,506,576,000	141,024,400	1,537,602,000
DPU PR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	1,700,000,000	0	-	500,000,000	500,000,000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	370,000,000	1,252,400,000	1,025,000,000	270,000,000	270,000,000
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,560,000,000	2,500,000,000	256,445,000	2,500,000,000	2,500,000,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,509,857,000	8,836,976,000	763,000,000	5,799,754,000	5,799,754,000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	45,480,000	361,294,000	200,000,000	45,480,000	45,480,000
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	930,000,000	1,674,000,000	963,000,000	1,444,000,000	1,444,000,000
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	4,034,347,000	6,508,022,000	200,000,000	12,552,614,000	12,552,614,000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2,230,403,000	4,915,709,000	1,920,042,100	8,430,709,000	8,430,709,000
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah		57,677,000	0	57,677,000	57,677,000
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi		606,125,000	353,360,460	590,000,000	590,000,000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	9,937,866,000	10,000,000,000	27,208,000,000	11,208,000,000	11,208,000,000

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	39,792,000,000	16,409,079,000	20,200,000,000	15,600,000,000	15,600,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jalan	55,571,495,000	36,310,211,000	63,831,197,000	52,757,000,000	52,757,000,000
			Pemeliharaan Rutin Jalan	12,785,828,000	12,000,000,000	11,967,899,130	12,400,000,000	12,400,000,000
			Pembangunan Jembatan		2,825,000,000	12,000,000,000	-	-
			Pelebaran Jembatan		1,000,000,000	1,650,000,000	-	-
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,000,000,000	498,685,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	2,350,000,000	3,650,000,000	875,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000
DINKES PPKB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,000,692,570	7,461,000,000	6,076,000,000	2,600,000,000	2,850,000,000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,161,548,000	3,207,000,000	0	3,570,000,000	2,535,000,000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20,371,819,000		
DISPERKIMHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	17,199,172,000	12,682,519,000	17,818,500,000	3,838,876,000	3,477,919,000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,960,849,000	9,336,773,000	9,689,135,000	6,501,813,000	30,113,275,000
BPKPD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	620,718,195,000	402,947,016,000	659,822,607,670	575,184,518,000	575,259,815,000
DISPERMADES	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	1,726,812,000	991,496,000	991,496,000	1,027,050,000	1,039,861,000

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	39,792,000,000	16,409,079,000	20,200,000,000	15,600,000,000	15,600,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jalan	55,571,495,000	36,310,211,000	63,831,197,000	52,757,000,000	52,757,000,000
			Pemeliharaan Rutin Jalan	12,785,828,000	12,000,000,000	11,967,899,130	12,400,000,000	12,400,000,000
			Pembangunan Jembatan		2,825,000,000	12,000,000,000	-	-
			Pelebaran Jembatan		1,000,000,000	1,650,000,000	-	-
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,000,000,000	498,685,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	2,350,000,000	3,650,000,000	875,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000
DINKES PPKB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,000,692,570	7,461,000,000	6,076,000,000	2,600,000,000	2,850,000,000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,161,548,000	3,207,000,000	0	3,570,000,000	2,535,000,000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20,371,819,000		
DISPERKIMHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	17,199,172,000	12,682,519,000	17,818,500,000	3,838,876,000	3,477,919,000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,960,849,000	9,336,773,000	9,689,135,000	6,501,813,000	30,113,275,000
BPKPD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	620,718,195,000	402,947,016,000	659,822,607,670	575,184,518,000	575,259,815,000
DISPERMADES	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	1,726,812,000	991,496,000	991,496,000	1,027,050,000	1,039,861,000

OPD Pengampu	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Pagu Indikatif				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	39,792,000,000	16,409,079,000	20,200,000,000	15,600,000,000	15,600,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jalan	55,571,495,000	36,310,211,000	63,831,197,000	52,757,000,000	52,757,000,000
			Pemeliharaan Rutin Jalan	12,785,828,000	12,000,000,000	11,967,899,130	12,400,000,000	12,400,000,000
			Pembangunan Jembatan		2,825,000,000	12,000,000,000	-	-
			Pelebaran Jembatan		1,000,000,000	1,650,000,000	-	-
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	1,000,000,000	498,685,000	500,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
			Pemeliharaan Berkala Jembatan	2,350,000,000	3,650,000,000	875,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000
DINKES PPKB	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,000,692,570	7,461,000,000	6,076,000,000	2,600,000,000	2,850,000,000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,161,548,000	3,207,000,000	0	3,570,000,000	2,535,000,000
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			20,371,819,000		
DISPERKIMHUB	PROGRAM PENYELENGGARAAN	Penyediaan Perlengkapan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	17,199,172,000	12,682,519,000	17,818,500,000	3,838,876,000	3,477,919,000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	4,960,849,000	9,336,773,000	9,689,135,000	6,501,813,000	30,113,275,000
BPKPD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	620,718,195,000	402,947,016,000	659,822,607,670	575,184,518,000	575,259,815,000
DISPERMADES	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	1,726,812,000	991,496,000	991,496,000	1,027,050,000	1,039,861,000

BAB V
PENUTUP

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, diharapkan dapat menjadi acuan kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi, terarah dengan semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kebumen yang Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

DAFTAR PUSTAKA

[1] Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro*, Ed.1. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN, 2004.

[2] H. Heryanah, "Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia," *Populasi*, vol. 23, no. 2, p. 1, 2015, doi: 10.22146/jp.15692.

[3] T. Supriatna, *Birokrasi, Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*, Cet.1. Bandung: Humaniora Utama Press, 1997.